

## BAB II

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### A. Sejarah Kabupaten Magelang

Seperti kita ketahui bersama saat ini, bahwa Magelang terdapat dua wilayah administratif, yakni Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Banyak timbul pertanyaan, sebenarnya lebih dahulu mana antara kota atau kabupaten Magelang? Dan lebih tua mana diantara keduanya? Ada beberapa sumber dan argumentasi yang dapat digunakan untuk menelusurinya.

Pertama, Hasil penelitian Museum Nasional dan Museum Radya Pustaka Surakarta Hadiningrat, bahwa keberadaan Magelang diawali dengan desa perdikan (kawasan bebas pajak) bernama Mantyasih (saat ini disebut dengan daerah Mateseh). Mantyasih sendiri memiliki arti Beriman dalam Cinta Kasih. Yang mendasari sumber ini adalah Prasasti POH, Prasasti Gilikan dan Prasasti Mantyasih. Ketiganya merupakan prasasti yang ditulis diatas lempengan tembaga, yang ditulis zaman Mataram Hindu saat pemerintahan Raja Rake Watukura Dyah Balitung (898-910 M). Dimana didalam prasasti ini disebut-sebut adanya Desa Mantyasih dan nama Desa Glangglang. Mantyasih inilah yang kemudian berubah menjadi Meteseh, sedangkan Glang-glang berubah menjadi Magelang.

Dalam Prasasti Mantyasih berisi antara lain, penyebutan nama Raja Rake Watukura Dyah Balitung, serta penyebutan angka 829 Çaka bulan Çaitra tanggal 11 Paro-Gelap Paringkelan Tungle, Pasaran Umanis hari Senais Sçara atau Sabtu, dengan kata lain Hari Sabtu Legi tanggal 11 April

907. Dalam Prasasti ini disebut pula Desa Mantyasih yang ditetapkan oleh Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung sebagai Desa Perdikan atau daerah bebas pajak yang dipimpin oleh pejabat patih. Juga disebut-sebut Gunung Susundara dan Wukir sumbing yang kini dikenal dengan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dan tanggal inilah (11 April 907) yang disahkan oleh Pemerintah Kota Magelang sebagai Hari Jadi Kota Magelang (berdasarkan Perda No. 6/1989).

Kedua, ketika Inggris menguasai Nusantara pada 1801, dijadikanlah sebagai pusat pemerintahan setingkat Kabupaten dan diangkatlah Mas Ngabehi Danukromo sebagai Bupati pertama. Bupati ini pulalah yang kemudian merintis berdirinya Kota Magelang dengan membangun Alun - alun, bangunan tempat tinggal Bupati serta sebuah masjid. Dalam perkembangan selanjutnya dipilihlah Magelang sebagai Ibukota Karesidenan Kedu pada tahun 1818. Menara air minum dibangun di tengah-tengah kota pada tahun 1918, perusahaan listrik mulai beroperasi tahun 1927.

Namun, karena tanggal dan bulannya masih belum diketahui secara pasti maka tahun 1801 tidak ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Magelang. Pada saat ini, di Kabupaten Magelang lebih dikenal adanya Hari Jadi Kota Mungkid dari pada Hari Jadi Kabupaten Magelang. Setidaknya, ini terlihat dari perhelatan peringatan hari bersejarah tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yakni pada tanggal 22 Maret 1984.

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1950, Kota Magelang berdiri sendiri sebagai daerah yang diberi hak untuk mengatur Rumah Tangga sendiri. Sehingga ada kebijaksanaan untuk memindahkan Ibukota Kabupaten

Magelang ke daerah lain. Selain itu dasar pertimbangan lainnya adalah nantinya pemindahan Ibukota lebih berorientasi pada strategi pengembangan wilayah yang mampu menjadi stimulator bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Selanjutnya dari 4 alternatif Ibukota yang dipersiapkan yaitu Kecamatan Mungkid, Muntilan, Secang dan Mertoyudan, akhirnya Desa Sawitan Kecamatan Mungkid terpilih untuk menjadi Ibukota Kabupaten Magelang dengan nama Kota Mungkid berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 1982. Peresmian Kota Mungkid dilakukan pada tanggal 22 Maret 1984 oleh Gubernur Jawa Tengah. Momentum inilah yang dipakai menjadi dasar Hari Jadi Kota Mungkid.

Berdasarkan pada tiga hal diatas, maka secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pada awalnya antara kota dan kabupaten Magelang adalah satu. Dimana kota Magelang adalah ibukota dari Kabupaten Magelang sampai dikeluarkannya UU 13/1950 yang menyebutkan bahwa Kota Magelang adalah wilayah administratif yang dapat mengatur rumah tangga sendiri. Dengan keputusan tersebut, maka Kabupaten Magelang harus mencari pengganti ibukota yang baru. Dengan pertimbangan percepatan perkembangan wilayah maka dipilihlah Kecamatan Mungkid sebagai ibukota kabupaten.

## **B. Kondisi Geografis Kabupaten Magelang**

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Tengah tepatnya berada di bagian tengah tengah Propinsi Jawa Tengah yang terletak pada posisi 1100 – 01’-51” dan 1100- 26’ – 58” Bujur Timur dan 70 – 19’ – 13” dan 70- 42’ – 16” Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang

Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali . . .

Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan DIY Yogyakarta

Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan, 372 desa. Adapun

pembagian wilayah administrasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Desa	dusun
1.	Salaman	20	116
2.	Borobudur	20	92
3.	Ngluwar	8	67
4.	Salam	12	95
5.	Dukun	15	143
6.	Srumbung	17	127
7.	Muntilan	14	111
8.	Mungkid	16	115
9.	Sawangan	15	124
10.	Candimulyo	19	97
11.	Mertoyudan	13	117
12.	Tempuran	15	89
13.	Kajoran	29	121
14.	Kaliangkrik	20	117
15.	Bandongan	14	93
16.	Windusari	20	100
17.	Secang	20	126
18.	Tegalrejo	21	128
19.	Pakis	20	147

20.	Grabag	28	159
21.	Ngablak	16	95
Jumlah		372	2.379

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan 372 desa serta 2.379 dusun yang mana kecamatan yang paling banyak mempunyai desa adalah kecamatan grabag karena memiliki luas wilayah yang paling luas. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa adalah kecamatan salam yang terletak di

### C. Kondisi Sosial dan Ekonomi

#### 1. jumlah penduduk kabupaten Magelang

Jumlah penduduk kabupaten Magelang sampai tahun 2010 tercatat 1.180.217 dengan klasifikasi seperti tabel dibawah ini :

Tabel II.2

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang

Tahun	2009	2010
Jumlah pria (jiwa)	574.238	593.990
Jumlah wanita (jiwa)	576.904	605.981
Total (jiwa)	1.170.894	1.180.217
Pertumbuhan penduduk %	0,87	0,89
Kepadatan penduduk (jiwa/km2)	1.078	1.087

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Magelang

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk Kabupaten magelang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata kurang dari 1% . pada tahun 2009 jumlah antara laki-laki dan perempuan lebih banyak

laki-laki. Sedangkan pada tahun 2010 justru pertumbuhan penduduk yang sejenis kelamin perempuan lebih besar dengan jumlah selisih 11.991 orang. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk pemerintah Kabupaten Magelang mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan oleh dinas terkait di setiap desa.

## 2. Pertanian

### a. Pertanian Tanaman Pangan

Secara umum produksi tanaman pangan di kabupaten magelang dapat di kategorikan ke dalam enam (6) kategori pokok yaitu : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai. Mengenai kegiatan pertanian tanaman pangan di kabupaten magelang dapat di lihat dari tabel berikut ini :

Tabel II.3

Luas Panen, Produksi dan Prosuksi panen padi dan paalawija di kabupaten magelang Tahun 2008-2010

No	Jenis Tanaman	2008 P (ton)	2009 L (Ha)	2010 P (Ton)
1	Padi	300 495	53 498	317 538
2	Jagung	68 327	15 489	77 470
3	Ubi Kayu	75 857	3 305	82 310
4	Ubi Jalar	39 507	1 298	32 084
5	Kacang Tanah	1 727	1 305	1 359
6	Kedelai	3	12	11

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Magelang

Pada umumnya tanaman pangan yang banyak di usahakan oleh penduduk Kabupaten magelang adalah berupa padi yang merupakan

makanan pokok masyarakat indonesia. Sedangkan untuk tanah-tanah yang tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam padi , maka masyarakat kabupaten magelang mengolah tanah-tanah tersebut untuk di tanami palawija.

#### b. Pertanian Sayur Mayur

Kabupaten magelang sangat terkenal dengan penghasil sayur mayur, sektor pertanian ini telah menjadi ikon tersendiri bagi kabupaten magelang, daerah daerah yang terkenal dengan pertanian sayuran antara lain di lereng gunung merbabu dan merapi.mengenai kegiatan pertanian sayuran kabupaten magelang dapat di lihat dari tabel berikut :

tabel II.4

Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran kabupaten magelang Tahun 2008-2010

No	No	Jenis sayuran	2008 P(kwintal)	2009 Lap (ha)	2010 P (kwintal)
	1	Bawang putih	7 715	185	10 005
	2	Bawang merah	1 319	28	3 873
	3	Bawang daun	139 760	1 259	125 992
	4	Kentang	52 940	426	59 924
	5	Kobis	593 854	3 638	666 455
	6	Sawi	127 718	1 198	154 710
	7	Wortel	210 099	941	150 388
	8	Kacang panjang	109 241	1 379	131 091
	9	Cabai merah	193 096	3 109	240 588
	10	Ketimun	81 891	596	82 290
	11	Kangkung	147	3	139
	12	Labu siam	26 712	75	44 811
	13	Tomat	176 061	1 032	162 646

14	Terong	73 473	593	108 283
15	Buncis	85 382	979	61 401
16	Bayam	467	19	706

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Magelang

Hasil panen sayuran kabupaten magelang biasanya di setorkan ke kota kota di sekitarnya seperti salatiga, semarang, jogjakarta dan kota kota di jawa tengah lainnya, kecamatan yang paling banyak menghasilkan sayuran terutama di kecamatan Ngablak, kecamatan Pakis. Kecamatan Kaliangkrik dan lainnya.

### 3. Perikanan

Selain pertanian, masyarakat kabupaten magelang juga melakukan usaha budidaya ikan air tawar melalui kolam kolam buatan, kondisi sektor perikanan kabupaten magelang dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel II.5  
produksi ikan konsumsi per kapita menurut jenisnya (2008-2010)  
(kg/kapita)

Jenis ikan	2008	2009	2010
Bawal	0,15	0,30	0,31
Gurame	0,04	0,19	0,21
Karper	1,01	0,66	0,55
Lele	0,24	0,56	0,76
Nila	0,89	0,98	1,42
Tawes	0,56	0,43	0,31

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa secara umum perikanan di kabupaten magelang kurang berkembang, hal tersebut di karenakan kurangnya debit air dan masyarakat lebih memilih untuk bercocok tanam dari pada budidaya ikan.



## **D. Sarana dan Prasarana Kabupaten Magelang**

### **1. Transportasi Darat**

Prasarana jalan sangat berperan dalam mendukung aktifitas sosial ekonomi di daerah ini dengan panjang jalan keseluruhan sampai saat ini adalah 795,20 dimana 80 % di antaranya dalam kondisi bagus dengan permukaan aspal halus.

### **2. Air bersih**

Kebutuhan air bersih di layani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bagi masyarakat yang berada di sekitar kota Magelang dimana besarnya potensi air bersih yang tersedia memungkinkan PDAM memenuhi kebutuhan masyarakat maupun industri utamanya yang berada di sekitar ibukota kabupaten. Sedangkan untuk wilayah pedesaan, masyarakat Kabupaten Magelang memanfaatkan sumber mata air yang banyak terdapat di bukit atau gunung sekitarnya.

### **3. Telekomunikasi**

Telepon dan internet dapat di temukan pada hampir semua ibukota kecamatan di daerah ini, yang menciptakan efisiensi dalam skala lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk pelayanan jasa pos di setiap kecamatan terdapat kantor pos dan beberapa di kabupaten

### **4. pariwisata**

Sektor pariwisata andalan Kabupaten Magelang adalah situs purbakala Candi Borobudur yang letaknya dekat dengan ibukota

Magelang, di samping candi Borobudur terdapat banyak tempat-tempat wisata seperti Ketep Pass, Candi Mendud, air terjun Sekar Langit, Air terjun Kedung kayang dan masih banyak lagi yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

#### **5. fasilitas kesehatan**

Jumlah fasilitas kesehatan di kabupaten Magelang pada tahun 2007 sebanyak 3 unit rumah sakit, 1 unit Rumah sakit jiwa, dan fasilitas puskesmas yang tersedia di seluruh kecamatan. Selain itu daerah-daerah yang agak terpencil, Pemda menyediakan Puskesmas Keliling.

#### **6. Hotel dan Restoran**

Umumnya fasilitas hotel dan penginapan dapat di temukan di sekitar Candi Borobudur dengan jumlah hotel dan penginapan sampai saat ini sebanyak enam belas buah dengan klasifikasi non bintang namun dilengkapi dengan fasilitas yang cukup, sedangkan restoran tersedia pada hampir seluruh wilayah daerah dengan skala lokal.

### **E. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang**

#### **1. Visi Dan misi**

Penetapan visi bagian dari perencanaan strategi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai tetapi juga pada kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan beberapa komitmen kecuali adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi termasuk perencanaan strategi secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut.

Dengan demikian visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Melihat hasil analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah : **“Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Amanah”**

Sedangkan misi merupakan pernyataan umum yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk itu maka misi yang diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur, berkualitas dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional.

3. Mewujudkan aparat pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yang bersih dan berkualitas.

## **2. Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Magelang No 32 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang mempunyai struktur atau susunan sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

#### **2. Sekretaris**

- a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### **3. Bidang Pengelolaan Pendapatan**

- a. Sie Analisa Pendapatan
- b. Sie Pendataan dan Penetapan
- c. Sie Penagihan dan Penyelesaian Sengketa Pajak

#### **4. Bidang Anggaran**

- a. Sie Penyusunan Anggaran
- b. Sie Akuntansi dan Pelaporan

#### **5. Bidang Pengelolaan Aset**

a. Sie Pengolahan Data

b. Sie Fasilitas Pengelolaan Aset Pengadaan dan Mutasi

6. Bidang Kas Daerah

7. Sub Bagian Tata Usaha pada Kas Daerah

Untuk melaksanakan tugas dengan optimal, maka masing-masing bagian, bidang dan seksi tersebut diatas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Bertugas memimpin, membina mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi kegiatan pengadministrasian umum, pembinaan dan pengembangan, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil, anggaran dan pengelolaan aset, serta akuntansi, berdasarkan kewenangan dan manajemen keuangan yang diarahkan oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) sesuai kebijakan umum daerah dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan penyusunan perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan

dalam kegiatan pelayanan umum di bidang administrasi keuangan daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku dan searah kebijakan umum daerah.

2. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi keuangan daerah serta pengkoordinasian kegiatan kedinasan meliputi administrasi kesekretaritan, penganggaran, pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, umum dan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pedoman urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan concurrent) serta memfasilitasi penyusunan laporan keuangan, penanganan pendapatan asli daerah dengan penetapan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain, persiapan data realisasi penerimaan dana bgai hasil pajak dan bukan pajak serta pembiayaan dan penetapan kebijakan pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan aset sesuai Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah, perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan serta APBD dan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi penerimaan dan belanja serta verifikasi sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, bendahara umum daerah yang diarahkan oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) yang searah dengan kebijakan umum daerah dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian tugas-tugas kedinasan bawahan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

## 2. Sekretaris

Sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, maka Sekretariat mempunyai tugas :

- Memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan yang meliputi urusan administrasi penganggaran, akuntansi, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepegawaian, penyusunan program kedinasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya sesuai dengan arahan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan perencanaan program

kegiatan kedinasan dan kesekretaritan serta peraturan perundang-undangan bidang perpajakan dengan unsur bidang di lingkup Dinas maupun dengan SKPD terkait.

2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberian pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkup Dinas meliputi penyusunan perumusan perencanaan anggaran, akuntansi dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan kerumahtanggaan serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tertib administrasi umum Dinas.
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kesekretariatan maupun teknis bidang-bidang lain dengan prinsip koordinatif, integratif, simplikatif dan sinkronitatif antar unsur dilingkup Dinas maupun dengan SKPD terkait sesuai dengan arahan Kepala Dinas yang searah dengan kebijakan umum daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategis, secara berkala sebagai bahan penyusunan Renstra, RKT dan Lakip Dinas pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tupoksi dan tanggungjawabnya
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Sub Bagian ini mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan kegiatan kedinasan untuk memimpin, membina bawahannya dan mengkoordinasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program sebagai bahan penyusunan Renstra, RKT dan Lakip Dinas serta tugas-tugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan sesuai arahan Sekretaris Dinas dan kebijakan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan yang berkaitan dengan tata hubungan kerja dalam rangka peningkatan dan pengembangan serta pengelolaan keuangan daerah.
- Penyusunan rencana kerja internal dengan melalui koordinasi antara bidang-bidang.
- Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penilaian dan penyajian data.
- Pelaksanaan monitoring dan koordinasi dalam rangka menyusun bahan evaluasi dan pelaporan sebagai bahan penyusunan Renstra, RKT dan Lakip kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggungjawab kewenangannya.

**b. Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, dan perbendaharaan. Sedangkan fungsi sub bagian keuangan yaitu melakukan penyusunan rencana anggaran.

**c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan dan pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan atau pembekalan dinas serta melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, mutasi dan tata usaha kepegawaian. Sedangkan fungsi bagian umum kepegawaian yaitu pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman dan kearsipan.

**3. Bidang Pengelolaan Pendapatan**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran terhadap subyek dan obyek pajak daerah, retribusi daerah, dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Sedangkan fungsi dari bidang

pengelolaan pendapatan adalah pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data subjek dan objek wajib pajak dan retribusi daerah, bagian pengelolaan pendapatan terdiri dari :

a. **Sie Analisa Pendapatan**

Melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran terhadap subyek dan obyek pajak daerah, retribusi daerah, dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

b. **Sie Pendataan dan Penetapan**

Mempunyai tugas melakukan pendataan dan penetapan wajib pajak dan retribusi daerah. Sedangkan fungsi dari sie pendataan dan penetapan adalah pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak dan retribusi daerah.

c. **Sie Penagihan dan Penyelesaian Sengketa Pajak**

Mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Sedangkan fungsi dari sie penagihan dan penyelesaian sengketa pajak yaitu pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4. Bidang Anggaran**

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan serta tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, PBB dan pengelolaan kertas berharga. Sedangkan fungsinya adalah pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan atau pembayaran pajak dan retribusi daerah ke dalam kartu jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Bidang ini terdiri dari :

**a. Sie Penyusunan Anggaran**

Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi SKP, SKR, SPPT PBB, kertas berharga, dan ketetapan pajak lainnya. Seksi penyusunan anggaran mempunyai fungsi yaitu penerimaan dan pencatatan SKP dan SKR dan surat-surat ketetapan pajak lainnya dan SPPT PBB.

**b. Sie Akuntansi dan Pelaporan**

Mempunyai tugas memuat dan menyiapkan laporan mengenai realitas penerimaan pajak, retribusi daerah, PBB, dan kertas berharga. Seksi ini mempunyai fungsi yaitu penyiapan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB.

**5. Bidang Pengelolaan Aset**

Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis manajemen keuangan daerah dengan menyelenggarakan kegiatan pendataan dan penilaian, perhitungan

dan penetapan jumlah ketetapan pajak daerah, penagihan subjek/objek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai kebijakan umum daerah

a. Sie Pengolahan Data

Menyelenggarakan kegiatan pendataan dan penilaian, perhitungan dan penetapan jumlah ketetapan pajak daerah, penagihan subjek/objek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

b. Sie Fasilitas Pengelolaan Aset Pengadaan dan Mutasi

Mengkoordinasikan kegiatan operasional program pemeliharaan barang dan perubahan status hukum atas barang daerah dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang yang searah dengan kebijakan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun struktur organisasi dan daftar nama pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel II.6

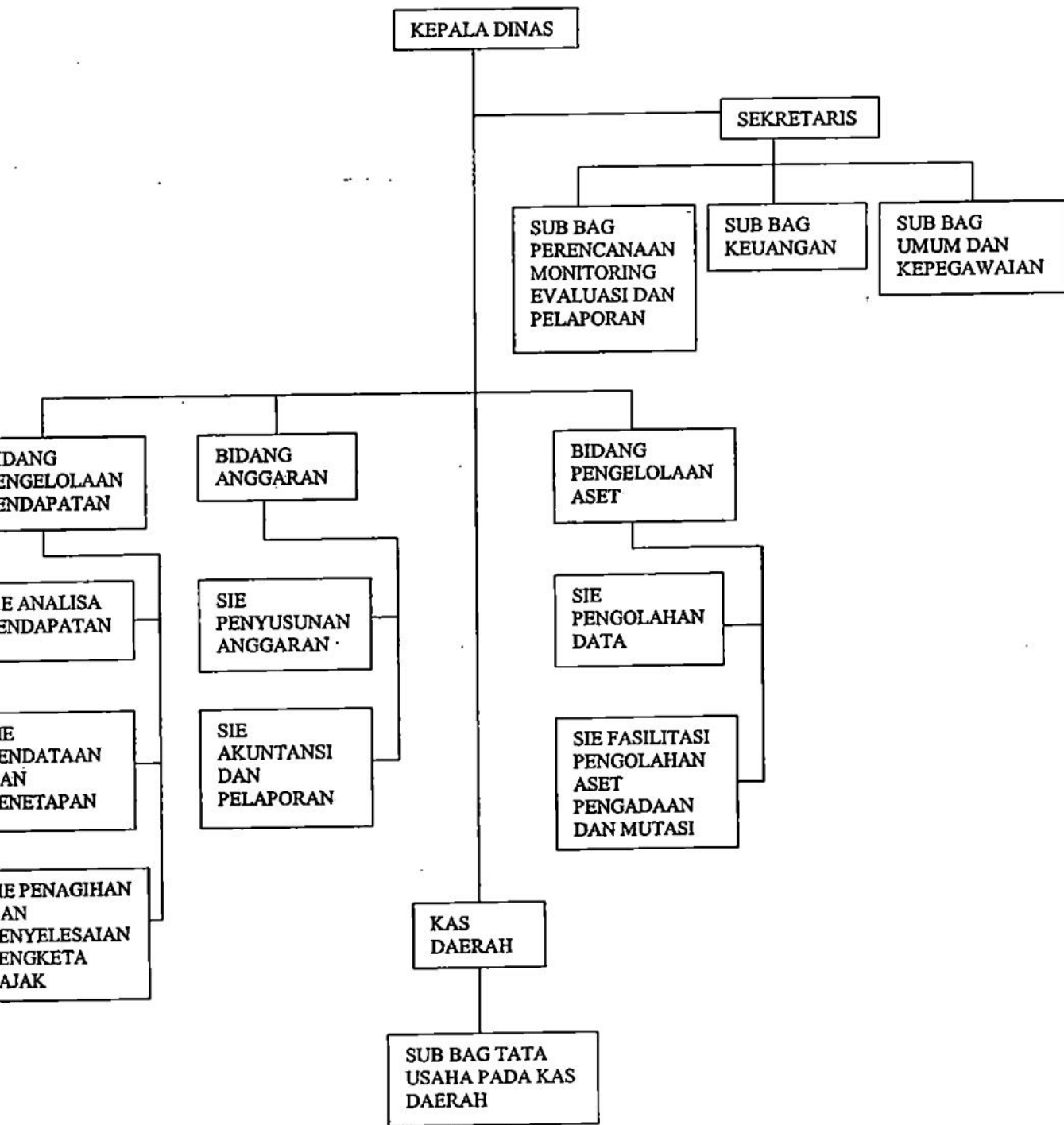
Daftar nama pejabat DPPKAD Kabupaten Magelang

Nama	Jabatan
Drs. H. Susanto	Kepala DPPKAD

Drs. Arwoko Suryohadi	Sekretaris DPPKAD
Drs. Agus Rudoto	Ka. Bid. Pengelolaan Pendapatan
Dra. Siti Zumaroh	Ka. Bid Anggaran
Ganis Hari Saktiyono, SP	Ka. Bid. Pengelolaan Aset
Abdul Rochim	Kasie Fasilitas Pengelolaan Aset, Pengadaan dan Mutasi
Widodo, SH	Kasie Pengolahan Data
Dra. Betty Sulistyawati	Kasubag Keuangan
L. Hadi Soeprawoto	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Amirudin Zuhri, S.Sos,M.Si	Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dra Sinta Artiningsih	Kasie Penagihan dan Penyelesaian Sengketa Pajak
Suprayitno, SE	Kasie Pendataan dan Penetapan
Dra. Heni Trihartati	Kasie Analisis Pendapatan
Isti Poerwati, SE	Kasie Akuntansi dan Pelaporan
Suryati, S.Sos	Ka. UPT Kas Daerah
Drs. Ari Handoko	Kasie Penyusunan Anggaran
Tri Rahayu H, S.Sos	Kasubag TU Pada Kas Daerah

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Magelang

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**



Sumber : Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

### 3. Sarana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, maka diperlukan adanya sarana pendukung yang memadai. Adapun sarana yang dimiliki oleh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Magelang adalah sebagai berikut ;

Tabel II.7  
Sarana yang dimiliki DPPKAD Kabupaten Magelang

No	Jenis sarana	Yang tersedia	Dibutuhkan/ penambahan
1	Mesin ketik	8	10
2	Mesin stensil	3	5
3	Mesin hitung	2	5
4	Lemari arsip	9	12
5	Brankas	3	5
6	Komputer	9	16
7	Sepeda motor	5	7
8	Mobil dinas	4	6

Sumber : Kantor DPPKAD kab. Magelang 2009

Saran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang sudah di rasakan cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas. Tetapi tidak di pungkiri dengan masih banyaknya sarana yang harus ditambah sesuai dengan beban kerja di dinas tersebut.

#### **F. Kondisi Kepegawaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang**

Jumlah pegawai yang ada di dDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang sebanyak 38 Orang yang terdiri dari 22 pegawai laki-laki dan 16 orang pegawai perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian sebagian besar pegawai DPPKAD Kabupaten Magelang berjenis kelamin laki-laki.



Berdasarkan tingkat pendidikannya, kondisi pegawai DPPKAD kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel II.8  
Kondisi Pegawai DPPKAD Kabupaten Magelang berdasarkan tingkat pendidikannya

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SMP	2	5,88
2	SMA	7	20,58
3	D3	3	8,82
4	S1	21	61,76
5	S2	1	2,94
Jumlah		34	100,00

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Magelang

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang memiliki tingkat pendidikan S1, yaitu sebanyak 61,76 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegawai Dinas Pendapatan < pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang telah memiliki tingkat pendidikan yang memadai sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas di bidang masing-masing.

#### **G. Pelatihan Untuk Peningkatan Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, maka salah satu metode yang ditempuh adalah dengan

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut bertujuan untuk :

- a. Peningkatan kemampuan dalam jabatan yang sama, promosi pangkat dalam jabatan yang sama atau perpindahan ke jabatan yang setingkat atau sebanding.
- b. Persiapan bagi mereka yang di promosikan ke jenjang golongan kepangkatan atau jabatan yang setingkat atau lebih tinggi.
- c. Peningkatan ketrampilan lainnya yang di anggap perlu.

Jenis pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

a. diklat Struktural menekankan pada pemantapan sikap mental, fisik dan disiplin, yang masing-masing jenjang menekankan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Diklat ADUM, pada kepemimpinan dan bimbingan serta penguasaan pengetahuan dan ketrampilan penyusunan program.
2. Diklat ADUMLA, pada kepemimpinan dan bimbingan serta penguasaan pengetahuan dan ketrampilan pelaksanaan pekerjaan.
3. Diklat SPMA, pada kepemimpinan dan bimbingan serta penguasaan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan kegiatan dan program.
4. Diklat SPAMEM, pada kepemimpinan dan bimbingan serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan pembinaan strategi

penataan program.

5. Diklat SPATI, pada kepemimpinan dan pembinaan serta ke dalam pola pikir dan wawasan secara terpadu baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional untuk memperkuat ketahanan nasional guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan bangsa.
- b. Kurikulum Diklat Fungsional menekankan pada peningkatan penguasaan pengetahuan dan atau sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang di perlukan di bidang masing-masing.
  - c. Kurikulum Diklat Teknis menekankan pada peningkatan penguasaan pengetahuan dan atau ketrampilan di bidang teknis masing-masing.